

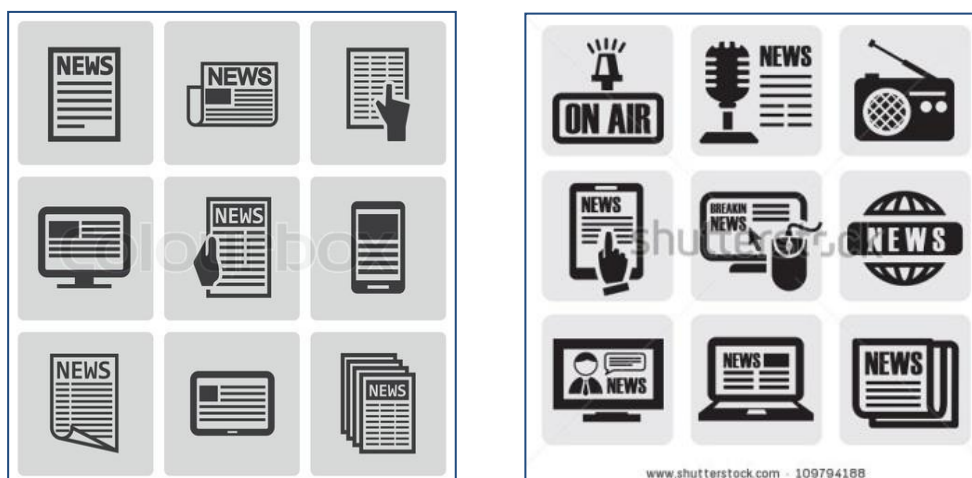


**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**e-Kliping Digital Media Online**

Wilayah & Tata Ruang

Senin, 2 Agustus 2021



**BIRO HUMAS DAN TATA USAHA PIMPINAN**  
**Perpustakaan & Kearsipan**  
**Jakarta, Bappenas**  
**2021**

## **Daftar Isi**

1. PENDATAAN SDGs DESA DAN KETAHANAN DESA - *Media Online Kompas*

# KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Senin

2 Agustus 2021

## Pendataan SDGs Desa dan Ketahanan Desa

Ivanovich Agusta

Sosiolog Pedesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

**D**i tengah deraan pandemi Covid-19, saat ini lebih dari 1,4 juta kelompok kerja relawan pendataan desa aktif menuntaskan pendataan SDGs (*Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa.

Bukan sekadar mengumpulkan informasi seputar 74.961 desa, melainkan juga lebih detail lagi sampai wilayah rukun tetangga (RT), kondisi keluarga, dan keadaan setiap warga desa.

Pada 9 Mei lalu, tersimpan data 84 juta warga desa, 28 juta keluarga, 460.000 RT, dan 42.927 desa. Seluruh data itu milik desa sebagaimana pegasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permen-Desa PDPTT) Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 20.

Untuk pertama kali, kelak sampai akhir Agustus 2021, desa memiliki sendiri daftar penganggur, penyandang difabel, warga usia sekolah yang putus sekolah, kondisi penyakit setiap warga, dan warga yang sakit, tetapi tidak mampu berobat.

Juga daftar keluarga yang tidak memiliki fasilitas MCK, rumahnya tidak layak huni, sulit berkendara ke lokasi kerja, hingga telah memiliki usaha tetapi sulit berkembang.

### Data ketahanan desa

Dari desa terkompilasi data tahunan dan harian. Informasi SDGs Desa terentang untuk menjemput data setahun ter-

akhir. Data harian desa ini mencakup kondisi pandemi Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Data harian menunjukkan, ketahanan desa masih lebih tinggi daripada kota selama pandemi setahun terakhir. Penderita Covid-19 di desa naik mulai Desember 2020, menanjak dari Maret 2021, tetapi tetap lebih rendah daripada kota.

Sampai 30 Juli 2021, sebanyak 3.372.374 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di tingkat nasional dan 92.311 orang di antaranya meninggal. Dibandingkan dengan data itu, di desa 14 persen (468.136 orang) terkonfirmasi positif dan 22 persen (20.191 orang) meninggal.

Ini mengabarkan bahwa strategi kesehatan terbaik bagi desa ialah pencegahan karena begitu terkonfirmasi positif bisa lebih sulit menjangkau layanan kesehatan untuk berobat.

Yang menarik, Padat Karya Tunai Desa dan BLT dana desa mampu mengerem laju pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan di desa lebih kuat daripada kota. Artinya, strategi kebijakan ekonomi desa mampu menjaga daya beli warga.

Pada Februari 2020-2021, tingkat pengangguran terbuka di desa sedikit naik 0,62 persen, sementara di kota melonjak 1,88 persen. Periode Maret 2020-2021 mencatat kemiskinan desa naik 110.000 jiwa (naik 0,28 persen), padahal di kota meningkat 1,02 juta jiwa (naik

0,51 persen). Ketimpangan ekonomi di desa juga menunjukkan penurunan dengan penurunan indeks rasio gini 0,002 dan sebaliknya di kota naik 0,008.

### Kebutuhan dan pelayanan

Data tahunan SDGs Desa memberikan gambaran mikro yang riil terjadi di lapangan, yang tanpa olahan data berarti sehingga mudah dipahami warga awam. Data tingkat desa dan RT menyajikan sisi pelayanan (*supply side*) pembangunan desa, seperti ketersediaan dan jangkauan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, posyandu, pos kesehatan desa (poskesdes), puskesmas, dan rumah sakit.

Untuk pertama kali terhitung pula data riil kebutuhan warga desa (*demand side*), seperti jumlah warga yang sakit menahun (misalnya saat ini muncul daftar 346.419 warga yang sakit TB paru), pemanfaatan puskesmas (141.577.155 kali didatangi warga), dan pemanfaatan poskesdes yang jauh lebih rendah (72.394.213 kali didatangi warga).

Dari sisi pelayanan, ada 27091 puskesmas dan 52.117 poskesdes. Puskesmas rata-rata melayani 5.225 kunjungan per tahun, sementara poskesdes 1.389 kunjungan per tahun. Ini menandai kebutuhan warga sakit lebih dipenuhi puskesmas di kecamatan. Ada tantangan poskesdes di desa agar ditingkatkan ragam layanannya guna mengaktifkan pengelolaan kesehatan warga.

### Modal membangun

Data SDGs Desa menjadi modal berharga bagi desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat guna menetapkan pemanfaatan pembangunan secara presisi. Bukan lagi menetapkan sasaran umum berbasis wilayah, tetapi sudah mendetail nama dan alamat individu, serta keluarga di RT.

Swasta dan LSM juga presisi mendeteksi sasaran aktivitas pengembangan komunitas.

Perencanaan berbasis bukti lapangan mengefisienkan anggaran negara. Lantaran data dikompilasi hingga level rukun tetangga, keluarga, dan warga, kegiatan pembangunan pasti berlainan sesuai masalah serta potensi setiap desa. Mimpi pembangunan asimetris, mengutamakan golongan terbawah dan wilayah tertinggal, akhirnya menemukan kaki operasionalnya di lapangan.

Kementerian Desa PDPTT sedang menyediakan teknologi informasi yang langsung menyajikan rekomendasi detail kegiatan sesuai hasil SDGs Desa. Ini memudahkan desa, pmda, dan pemerintah pusat merumuskan perencanaan dan penganggaran kegiatan mulai 2022.

Cara termudah adalah langsung mencomot rekomendasi yang tersusun secara algoritmik tersebut, memusyawarahkan, lalu mencantukannya dalam dokumen perencanaan.

Jika dihantui keterbatasan anggaran, Kemendesa PDPTT juga meluaskan aplikasi kegiatan

prioritas bagi setiap desa, kabupaten/kota, dan provinsi. Dihitung korelasi setiap tujuan SDGs Desa dan hubungan 122 rincian targetnya pada setiap wilayah.

Prioritas tersebut diurutkan dari nilai korelasi tertinggi hingga terendah. Prioritas tertinggi menunjukkan kegiatan yang memiliki dampak terbesar untuk menggaet aspek lain SDGs Desa.

### POJOK

Pandemi Covid-19 menuju 200 juta kasus. *Warga dunia bersatu bisa menghentikannya.*

Covid-19 menguji kearifan kita. *Ujian bagi kebersamaan kita juga.*

Subsidi upah bagi pekerja mulai dibagikan. *Jangan ada korupsi, ya.*

*Mang Ucil*